



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Januari 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI, Sekjen Kemenkes RI dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi oleh Wakil Ketua Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si Dan Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI membahas “**Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk:
  - a. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan persiapan penyelenggaraan haji bidang kesehatan, termasuk penyediaan anggaran pelaksanaan protokol kesehatan bagi calon jemaah haji, integrasi aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakalna, mekanisme pelaksanaan *PCR Swab Test* bagi calon jemaah haji, rekrutmen tenaga kesehatan haji, dan mematangkan rencana kontinjensi pada fase Armuzna.
  - b. Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI dalam melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bidang transportasi untuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi jemaah.
  - c. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dalam memaksimalkan diplomasi untuk memperoleh kepastian penyelenggaraan ibadah haji, alokasi kuota, dan teknis penyelenggaraan ibadah haji selama di Arab Saudi.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan/atau Menteri Perhubungan RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *One Gate Policy* dalam pelaksanaan umrah.
  - b. Menyampaikan rincian opsi kebijakan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada masa pandemi kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas pada forum panitia kerja BPIH.
  - c. Meningkatkan sosialisasi kepada calon jemaah haji mengenai promosi kesehatan pencegahan Covid-19, terutama akibat adanya varian baru.
  - d. Merumuskan kebijakan opsi pelaksanaan vaksinasi ketiga (*booster*) bagi calon jemaah haji.
  - e. Memastikan terpenuhinya kecukupan persediaan obat-obatan dan sarana-prasarana pelayanan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi.
  - f. Mengawasi kesiapan pihak maskapai penerbangan, termasuk kesiapan ketersediaan armada dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Yandri Susanto', with a stylized flourish at the end.

**H. YANDRI SUSANTO, Spt.**